



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUPIATI SAHID**
2. Jabatan : **KEPALA UPTD**
3. NHK : **700690**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.460.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/181 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.015 m2/1.500.000 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Bangunan Seluas 2.500.000 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Bangunan Seluas 1.129.000 m2 di KAB / KOTA MAJENE, Rp. 150.000.000
5. Bangunan Seluas 1.534.000 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 12.000 m2/12.000 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 195.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 155 CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, BEAT YAMAHA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SCUPI Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 100.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.145.297
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.805.145.297
III. HUTANG	Rp.	46.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.759.145.297

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.